
PATRIARKI SEBAGAI HAMBATAN STRUKTURAL DALAM KETERLIBATAN POLITIK PEREMPUAN

Wiwit Kurniasih¹, Annisa Latifah², Wanda Fitria³, Diah Ayu Lestari⁴, Junaedi⁵
Program Studi Ilmu Politik, Universitas Wanita Internasional Universitas Wanita Internasional
Email: wiwitkurniasih@iwu.ac.id¹, annisa.3201883@iwu.ac.id², wandafitriiii@gmail.com³,
diahayuuu23@gmail.com⁴, juned234@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya patriarki sebagai hambatan struktural dalam keterlibatan politik perempuan. Dengan pendekatan kualitatif dan teknik wawancara mendalam terhadap 5 informan, ditemukan bahwa budaya patriarki masih mengakar kuat di dalam kehidupan masyarakat, namun telah muncul dukungan dari kalangan generasi muda yang menunjukkan adanya pergeseran perspektif. Hambatan utama yang dihadapi meliputi budaya patriarki, stereotip yang berkembang di masyarakat, minimnya dukungan struktural dari partai politik dan rendahnya akses pelatihan. Penelitian menyimpulkan bahwa strategi afirmatif harus diperkuat dengan kebijakan substansif, perubahan budaya dan edukasi publik, serta pendidikan politik berkelanjutan untuk menciptakan representasi yang setara.

Kata kunci: Patriarki, Politik Perempuan, Stereotip

ABSTRACT

This study aims to analyze patriarchal culture as a structural barrier to women's political participation. Using a qualitative approach and in-depth interviews with five informants, it was found that patriarchal culture is still deeply rooted in society, but there is emerging support from the younger generation, indicating a shift in perspective. The main barriers faced include patriarchal culture, stereotypes prevalent in society, insufficient structural support from political parties, and limited access to training. The study concludes that affirmative strategies must be strengthened with substantive policies, cultural change, public education, and sustained political education to achieve equitable representation.

Keywords: Patriarchy, Women's Politics, Stereotypes

PENDAHULUAN

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Partisipasi ini merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses-proses politik, seperti pemilihan umum, pengambilan keputusan publik, serta kegiatan dalam lembaga-lembaga politik. Menurut Budiardjo (2008), partisipasi politik adalah aktivitas individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, guna memengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (containing) atau (lobbying) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya. Oleh karena itu, keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan, menjadi bagian esensial dalam menciptakan sistem politik yang inklusif dan representatif.

Dalam konteks demokrasi modern, upaya untuk meningkatkan keterlibatan politik perempuan terus digalakkan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti kuota politik, pendidikan politik berbasis gender, dan program pemberdayaan perempuan. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses ruang politik, terutama di negara-negara yang struktur sosialnya masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarki, termasuk Indonesia. Di Indonesia budaya patriarki masih mengakar kuat dalam sistem tatanan kehidupan masyarakat, seperti halnya perempuan masih cenderung mengurus urusan domestik, bahkan mayoritas masyarakatnya masih memiliki pemikiran budaya lama. Hal tersebut, membuat ruang lingkup perempuan terbatas, seperti halnya dari segi sosial atau politik.

Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan pilar krusial dalam mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan representatif. Partisipasi aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik tidak hanya memperkaya perspektif dan prioritas kebijakan, tetapi juga memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem demokrasi secara keseluruhan. Berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas hidup, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta perdamaian dan keamanan. Meskipun demikian, representasi dan partisipasi perempuan dalam politik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih jauh dari ideal. Berbagai faktor kompleks berkontribusi terhadap kondisi ini, mulai dari faktor sosio-kultural, ekonomi, hingga institusional. Salah satu akar permasalahan yang mendasar dan bersifat struktural adalah patriarki.

Dalam konteks politik, budaya patriarki ini menjadi hambatan utama yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam ranah publik dan pengambilan keputusan politik. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan dominasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ranah domestik hingga ruang publik, termasuk dalam sistem politik. Menurut Alfian Rokhmansyah (2013) di bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata patriarkat, berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral, dan segala-galanya. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan

gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior (Ade Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti A, 2017)

Budaya patriarki membentuk persepsi sosial yang memandang perempuan sebagai sosok yang lemah, emosional, dan tidak layak untuk memegang posisi strategis dalam politik. Stereotip ini melanggengkan ketidakadilan gender dan mendiskreditkan kemampuan perempuan dalam arena politik. Bahkan ketika perempuan telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai, mereka kerap kali tetap dihadapkan pada hambatan struktural, seperti mekanisme rekrutmen partai yang diskriminatif, akses terbatas terhadap sumber daya politik, serta rendahnya dukungan institusional (Angelita Epiphania Rnh et al., 2025).

Di Indonesia, kendati telah terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, tantangan substansial masih membayangi. Data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik formal seringkali hanya bersifat simbolik dan belum mencerminkan keterlibatan substantif. Hal ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor struktural dan kultural yang mendiskriminasi perempuan secara sistemik. Hambatan-hambatan tersebut antara lain mencakup sistem pemilu yang tidak sensitif gender, bias dalam partai politik, serta tekanan sosial dan kekerasan berbasis gender dalam dunia politik (VAWP).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana peran budaya patriarki dalam rumah tangga dan lingkungan sosial nenbatasi dukungan terhadap perempuan yang ingin terlibat dalam politik?
2. Bagaimana cara mengatasi anggapan bahwa perempuan yang aktif di politik cenderung “melawan kodrat” atau “terlalu ambisus”?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis peran budaya patriarki dalam rumah tangga dan lingkungan sosial membatasi dukungan terhadap perempuan yang ingin terlibat di dalam politik.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis cara mengatasi anggapan bahwa perempuan yang aktif di politik cenderung melawan kodrat atau terlalu ambisius.

KAJIAN PUSTAKA

1. Politik

Politik dapat dipahami sebagai seni dan ilmu dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks yang lebih luas, politik melibatkan proses pengambilan keputusan

kolektif untuk suatu komunitas, yang mencakup pembentukan kebijakan, distribusi sumber daya, serta resolusi konflik. Studi politik mencakup berbagai aspek, mulai dari teori politik, ideologi, sistem pemerintahan, perilaku politik, hingga hubungan internasional. Dengan demikian, politik bukan hanya sekedar perebutan kekuasaan, tetapi juga fondasi bagi tatanan sosial dan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.

Menurut Aristoteles filsuf Yunani kuno ini dalam karyanya "Politika" mendefinisikan politik sebagai usaha untuk mencapai kebaikan bersama. Baginya, manusia adalah *zoon politicon* atau makhluk politik, yang secara alami cenderung untuk hidup bermasyarakat dan berpartisipasi dalam urusan publik demi mencapai kehidupan yang baik (eudaimonia). Politik bukan sekedar mengatur kekuasaan, tetapi juga tentang pembentukan karakter warga negara dan pencapaian keadilan.

Menurut Niccolò Machiavelli dalam karyanya yang kontroversial, "*The Prince*," Machiavelli memberikan pandangan yang lebih pragmatis dan realistis tentang politik. Ia melihat politik sebagai seni untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Baginya, seorang penguasa harus bersedia melakukan tindakan yang dianggap tidak bermoral jika diperlukan demi stabilitas dan kejayaan negara. Fokusnya lebih pada bagaimana kekuasaan sebenarnya dijalankan, bukan bagaimana seharusnya dijalankan secara ideal.

Politik adalah arena kompleks dan dinamis yang melibatkan perebutan, penggunaan, dan distribusi kekuasaan serta sumber daya dalam masyarakat. Sebagai proses pengambilan keputusan kolektif, politik menjadi cara masyarakat membuat aturan dan kebijakan yang mengikat seluruh anggotanya. Meskipun tidak selalu menjadi fokus utama, dalam beberapa konteks, politik juga merupakan upaya untuk mencapai tujuan bersama seperti kesejahteraan, keadilan, atau stabilitas sosial. Interaksi antara beragam individu dan kelompok dengan kepentingan yang berbeda mewarnai dinamika politik. Pada dasarnya, politik memegang fungsi penting dalam masyarakat sebagai mekanisme untuk mengatur konflik, memelihara ketertiban, dan mengalokasikan nilai-nilai. Dengan demikian, politik dapat disimpulkan sebagai seni dan ilmu tentang bagaimana masyarakat mengatur dirinya sendiri melalui kekuasaan dan pengambilan keputusan, sebuah pemahaman yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Heywood, A. (2018). *Politics* (5th ed.). Red Globe Press. (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/2849/2533>)

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik perempuan merupakan transformasi penting dari peran domestik ke ranah publik, demi mewujudkan kesetaraan gender. Meskipun keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia telah diakui secara hukum, kenyataannya perempuan masih menghadapi banyak hambatan, baik struktural maupun kultural. Rendahnya representasi perempuan di parlemen

disebabkan oleh nilai-nilai sosial budaya patriarki, minimnya political will pemerintah, kualitas kaderisasi politik yang belum merata, dan penafsiran agama yang sempit.

Sejumlah kebijakan afirmatif telah diterapkan, seperti kewajiban 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, namun hasilnya belum konsisten. Pemilu 2004 hingga 2014 menunjukkan fluktuasi representasi perempuan, bahkan dengan kebijakan afirmasi yang sama. Di sisi lain, keterlibatan perempuan secara global masih lebih tinggi dibanding Indonesia.

Upaya peningkatan partisipasi perempuan mencakup beberapa strategi:

1. Pendidikan politik sejak dini, mulai dari keluarga dan pendidikan formal hingga lingkungan sosial.
2. Keterlibatan dalam organisasi pelajar, mahasiswa, dan sosial kemasyarakatan sebagai bekal kepemimpinan.
3. Advokasi dan penyadaran hak-hak politik bagi perempuan agar memiliki keberanian tampil di ruang publik.
4. Pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan peluang terpilih dalam kontestasi politik.
5. Dorongan struktural dari partai politik, termasuk penempatan strategis dalam daftar calon, bukan sekadar pemenuhan kuota.

Peluang perempuan untuk berperan lebih besar sebenarnya cukup terbuka, terutama dengan dukungan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Pemilu, dan konvensi internasional (CEDAW). Namun, perlu sinergi antara pendidikan politik, kesadaran gender, dan komitmen institusi politik untuk mendorong keterwakilan perempuan agar benar-benar bermakna, bukan hanya simbolik (Rizki Priandi & Kholis Roisah, 2019).

3. Gender

Dalam kajian feminisme, gender bermakna ciri atau sifat yang dihubungkan dengan jenis kelamin tertentu, baik berupa kebiasaan, budaya, maupun perilaku psikologis, bukan perbedaan secara biologis (Moh. Khuza'i, 2013). Istilah gender, belum ada perbendaharaan kamus besar Bahasa Indonesia, kata gender dari Inggris, gender berarti jenis kelamin. gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuannya yaitu dalam aspek biologis. Menurut Mosse (1996) gender merupakan seperangkat peran yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bukan secara biologis dan peran ini dapat berubah sesuai dengan budaya, kelas sosial, usia, dan latar belakang etnis, sedangkan menurut Bradley (2007), gender adalah suatu konstruksi sosial yang mengkategorikan perempuan dan laki-laki berdasarkan persepsi dan perasaan, serta gender itu bervariasi berdasarkan waktu, tempat, budaya serta pengalaman hidup (Sri Marmoah, 2017).

4. Diskriminasi

Menurut Theodorson dan Theodorson diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. istilah tersebut biasanya untuk melukiskan, suatu tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis.

Berbagai jenis diskriminasi yang sering terjadi di masyarakat antara lain tapi tidak terbatas pada:

- a. Diskriminasi berdasarkan suku/etnis, ras, dan agama/keyakinan
- b. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan gender (peran sosial karena jenis kelamin). Contohnya, anak laki-laki diutamakan untuk mendapatkan akses pendidikan dibanding perempuan; perempuan dianggap hak milik suami setelah menikah; dan lain-lain (dll).
- c. Diskriminasi terhadap penyandang cacat. Contoh: penyandang cacat dianggap sakit dan tidak diterima bekerja di instansi pemerintahan.
- d. Diskriminasi pada penderita HIV/AIDS. Contoh: penderita HIV/AIDS dikucilkan dari masyarakat dan dianggap sampah masyarakat
- e. Diskriminasi karena kasta sosial, Contoh: di India, kasta paling rendah dianggap sampah masyarakat dan dimiskinkan atau dimarjinalkan sehingga kurang memiliki akses untuk menikmati hak asasinya (Fulthoni et al., 2009).

Diskriminasi adalah suatu perilaku yang diarahkan pada seseorang yang berdasarkan semata-mata pada anggota kelompok yang memiliki nama yang baik atau menonjol. Diskriminasi ini bermula dengan berawalnya prasangka yang pada awalnya hanya perasaan-perasaan negatif yang lambat laun dan membawa seseorang itu pula terjadinya tindakan-tindakan membedakan terhadap orang-orang yang termasuk golong lain yang berbeda dengan dirinya. Diskriminasi meliputi perilaku rasis, suku, agama dan budaya serta jenis kelamin. Sebagai contoh, seseorang atau kelompok menilai kelompok lain yang berbeda dengan dirinya sebagai suatu kelompok yang sesat, dan memberi label “kafir”. Sehingga fenomena takfirisme yang menganggap orang lain berbeda pandangan ideologinya yang akan dipandang sebagai golongan kafir (Rani Ramadani et al., 2024).

5. Patriarki

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan bapak. Istilah patriarki dipakai untuk menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki sebagai kelompok dominan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan (Abraham Nurcahyo, 2016).

Murniati mendefinisikan patriarki sebagai suatu sistem laki yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang akan dilakukan atau tidak dilakukan (2004:8). Sistem ini

dianggap wajar sebab pembenarannya disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin dan bukan berdasarkan gender. Di samping itu, Murniti juga mengungkapkan ada yang meyakini bahwa kekuasaan yang mengontrol dan mendominasi pihak lain (2004:171). Pihak lain menurut yang meyakini definisi tersebut adalah kelompok miskin, lemah, rendah, tidak berdaya, juga lingkungan hidup dan perempuan. Dalam budaya patriarki, negara yang menganut budaya tersebut disebut patriarkis (Luthfia Rahma Halizah & Ergina Faralita, 2023).

Budaya patriarki masih sangat kuat melekat dalam masyarakat Indonesia, di mana laki-laki dianggap lebih dominan dan berhak mengambil peran kepemimpinan, sementara perempuan dinilai sebagai sosok lemah, bergantung, dan lebih cocok berperan dalam ranah domestik. Persepsi ini diperkuat oleh pandangan yang menggunakan perbedaan biologis sebagai dasar untuk menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Akibatnya, perempuan kerap mengalami diskriminasi sistemik, termasuk dalam akses dan partisipasi politik. Dalam konteks politik, perempuan masih kurang dilibatkan secara aktif, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai bagian dari struktur partai. Politik dianggap sebagai ranah maskulin yang tidak cocok bagi perempuan, sehingga keterlibatan mereka masih minim, terutama pada posisi strategis. Padahal, partisipasi politik perempuan sangat penting untuk mendorong demokrasi yang inklusif dan ramah gender, serta memastikan kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh berbagai hambatan, baik eksternal maupun internal. Hambatan eksternal meliputi budaya patriarki, aturan partai, sistem perekrutan, hambatan ekonomi, birokrasi, dan lingkungan sosial-politik yang tidak mendukung. Sementara itu, hambatan internal berasal dari perempuan itu sendiri, seperti rendahnya minat, kesadaran, dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam dunia politik (Fredik Lambertus Kollo, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy.J. Meleong, 2007).

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara mendalam yang telah dilakukan kepada informan ketika melakukan penelitian mengenai patriarki sebagai hambatan struktural dalam keterlibatan politik perempuan. Dalam melakukan observasi dan

wawancara mendalam terhadap informan, maka peneliti melakukannya berdasarkan lokasi serta waktu yang sudah diatur sebaik mungkin.

Patriarki merupakan budaya yang masih melekat dalam masyarakat Indonesia, dimana laki-laki dianggap lebih dominan dan berhak mengambil peran kepemimpinan, sementara perempuan dinilai sebagai sosok lemah, bergantung, dan lebih cocok berperan dalam ranah domestik.

Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara, teknik tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang alamiah, struktur wawancara yang peneliti rancang bukan merupakan pedoman wawancara yang baku, sehingga apabila jawaban yang diberikan oleh informan kurang jelas, maka peneliti mengajukan pertanyaan lain agar jawaban yang diberikan bisa lebih jauh saat mereka menjabarkan, maka peneliti dapat menganalisa patriarki sebagai hambatan struktural dalam keterlibatan politik perempuan, yang meliputi:

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di tingkat Desa Parongpong dan tingkat masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa, yaitu Ibu Empad yang menjabat sebagai bendahara desa. Bu Empad menyampaikan pandangan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam bidang politik, terutama dalam hal kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan ketegasan dalam mengelola keuangan dan program. Menurutnya:

“Perempuan itu telaten, sabar, dan peka. Dalam urusan politik, perempuan bisa jadi penyeimbang. Sayangnya, belum banyak yang percaya diri untuk tampil.”

Ia menilai bahwa budaya patriarki masih kuat di Desa Parongpong, di mana sebagian besar masyarakat masih menganggap politik adalah urusan laki-laki. Namun, Bu Empad secara pribadi dan juga sebagai bagian dari pemerintahan desa, mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan. Ia juga mengusulkan agar setiap kegiatan musyawarah desa wajib menghadirkan keterwakopan perempuan secara aktif, bukan hanya sebagai formalitas, tetapi huga berbicara dan memberikan masukan.

Bu Empad juga menjelaskan bahwa dalam tingkat masyarakat juga masih minim perempuan yang ikut terlibat dalam kegiatan politik. Menurutnya:

“Kebanyakan perempuan terlebih lagi di daerah saya masih kurang aktif dalam kegiatan politik. Saya melihat bahwa terdapat potensi besar dari aktivitas-aktivitas kegiatan, seperti pengajian, arisan, dan keaja bakti. Hal ini bisa menjadi ruang awal pendidikan politik informal. Saya juga mendukung adanya fasilitasi dari pemerintah desa atau pihak luar untuk memberikan pendidikan politik dasar dan kepemimpinan bagi kaum perempuan” (wawancara, 29 Juli 2025)

Pandangan masyarakat secara umum terhadap perempuan yang aktif di ranah politik

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun negara demokrasi, keterlibatan ini bukan hanya untuk laki-laki namun juga untuk perempuan. Meskipun keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia telah diakui secara hukum,

kenyataannya perempuan masih menghadapi banyak hambatan, baik struktural maupun kultural. Berikut hasil wawancara dari bapak Asoy dan ibu Iis sebagai berikut:

“Perempuan harus tetap pada ranah domestik dan tidak terlalu terlibat aktif dalam politik.”

(Asoy, wawancara, 18 Juni 2025)

“Perempuan tidak perlu terlalu masuk kedalam ranah politik, cukup berada di ranah domestik.”

(Iis, wawancara, 27 Juni 2025)

Berdasarkan pemaparan dari bapak Asoy dan ibu Iis sebagai informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa di beberapa perspektif masyarakat pemikiran bahwa perempuan tidak perlu terlibat dalam ranah politik itu masih kental. Alasan terbesar dari kurangnya persetujuan perempuan dalam ranah politik adalah ketakutan jika perempuan terlalu tinggi dari laki-laki maka bisa menurunkan derajat laki-laki.

Namun, beberapa masyarakat terutama di generasi Z mendukung keterlibatan perempuan dalam politik seperti yang dipaparkan oleh Santi sebagai berikut:

“Saya mendukung apabila ada kerabat atau saudara saya bahkan anak saya nanti jika mereka akan terjun di dunia politik, karena bagi saya, walaupun saya tidak memiliki ilmu atau kemampuan di ranah politik, namun saya mendukung para perempuan untuk bisa terjun di dunia politik, dan saya juga tidak setuju dengan adanya patriarki karena wanita butuh kebebasan untuk mengekspresikan dirinya.” (Santi, 27 Juni 2025)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam politik merupakan elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pandangan konservatif terhadap peran gender masih mengakar kuat dalam sebagian masyarakat, sebagaimana tercermin dari pernyataan Bapak Asoy dan Ibu Iis yang menganggap bahwa perempuan sebaiknya tetap berada di ranah domestik dan tidak terlalu aktif dalam politik. Pandangan ini menunjukkan bahwa hambatan struktural dan kultural—termasuk ideologi patriarki—masih menjadi tantangan utama bagi keterlibatan politik perempuan.

Di sisi lain, munculnya dukungan dari generasi muda yang menjadi indikator adanya pergeseran pandangan masyarakat ke arah yang lebih progresif. Generasi muda menunjukkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, serta mendukung ruang partisipatif yang lebih luas bagi perempuan dalam politik. Dengan demikian, meskipun hambatan masih ada, harapan akan perubahan sosial yang lebih inklusif semakin terbuka melalui dukungan generasi muda yang mulai menolak nilai-nilai patriarkal dan mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam ranah politik.

Stereotip atau pandangan tertentu yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik

Stereotip yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Politik masih dianggap sebagai ranah laki-laki, sementara perempuan dipandang lebih cocok mengurus urusan domestik dan keluarga. Persepsi ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan membatasi akses

mereka ke ruang publik, termasuk politik. Selain itu, perempuan sering dianggap kurang kompeten dan emosional sehingga tidak layak memimpin atau mengambil keputusan strategis. Stereotip ini membuat partisipasi perempuan dalam politik masih sangat rendah dan mereka sering dipandang hanya sebagai pelengkap atau alat politik semu tanpa peran nyata. Beban ganda sebagai pengurus rumah tangga dan politisi juga menjadi hambatan signifikan, karena perempuan harus membagi waktu antara tanggung jawab domestik dan aktivitas politik. (Suci Indah Lestari & Hertanto, 2024)

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada perempuan politisi, seperti dianggap melanggar norma atau terlalu ambisius, membuat banyak perempuan merasa minder dan enggan berpartisipasi aktif. Media juga turut memperkuat stereotip dengan lebih menyoroti penampilan dan kehidupan pribadi perempuan politisi daripada prestasi mereka. Di tingkat partai politik, perempuan sering tidak mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi akses jaringan, dana, maupun pelatihan politik, sehingga sulit bersaing secara setara dengan laki-laki. Meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk perempuan, implementasinya masih terbatas karena resistensi budaya patriarki dan kurangnya political will. Selain itu, interpretasi ajaran agama yang parsial dan norma sosial yang bias gender turut memperkuat hambatan struktural bagi perempuan dalam politik. Semua faktor ini secara sistematis mempersempit ruang gerak perempuan untuk berperan aktif dan signifikan dalam dunia politik Indonesia. (Eni Nur Wahyuni, n.d.)

Sistem patriarki dalam kestrukturannya atau pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di pemerintahan desa, ditemukan bahwa pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan masih cenderung dipengaruhi oleh pola pikir patriarkal. Belai menyampaikan bahwa walaupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan struktural yang sama dengan laki-laki, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan dominasi laki-laki dalam posisi strategis.

“Sebenarnya perempuan punya hak dan kesempatan yang sama. Tapi kalau dilihat dari kenyataan di lapangan, ya tetap saja yang jadi kepala seksi, kepala bidang, itu kebanyakan laki-laki. Perempuan biasanya di posisi administrasi, jadi sekretaris atau bendahara. Kadang ada yang pegang program sosial juga, tapi jarang yang pegang keputusan besar,”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sistem patriarki masih berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam distribusi tugas dan penempatan jabatan. Perempuan lebih sering ditempatkan dalam peran-peran administratif atau pendukung, seperti sekretaris, bendahara, atau pengelola kegiatan sosial. Sebaliknya, posisi kepala seksi, kepala bidang, atau jabatan pimpinan lebih banyak diisi oleh laki-laki.

Namun begitu, informan juga menekankan bahwa baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal seperti desa dan kecamatan, pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan berbagai upaya untuk menghapus pola pikir patriarkal tersebut. Hal ini dilakukan melalui pelatihan kepemimpinan

bagi perempuan, kampanye kesetaraan gender, serta program afirmasi yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan desa.

“Sekarang pemerintah juga sudah mulai banyak bergerak. Di desa kita juga ada pelatihan untuk perempuan supaya bisa lebih percaya diri pegang jabatan. Bahkan dari kecamatan juga sering dorong supaya perempuan dilibatkan dalam musyawarah dan program-program strategis. Tapi ya, memang butuh waktu untuk mengubah cara pandang masyarakat,” lanjutnya.

Dengan demikian, meskipun realitas sosial masih menunjukkan dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan, adanya inisiatif dari pemerintah memberikan harapan terhadap terciptanya pemerintahan desa yang lebih inklusif dan setara. Perubahan tersebut tentu memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar dapat berjalan secara berkelanjutan dan berdampak nyata.

Perempuan dalam ranah ruang politik

Perempuan dalam ranah politik adalah keterlibatan aktif perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik, baik sebagai pemilih, aktivis, maupun pemegang jabatan politik. Kehadiran perempuan di ruang politik sangat penting untuk mewujudkan representasi yang adil, kebijakan yang inklusif, serta mendorong kesetaraan gender. Meskipun secara hukum telah dijamin, perempuan masih menghadapi hambatan seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya politik. Namun, seiring waktu, kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan membuka peluang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan politik yang demokratis dan berkeadilan. Berikut hasil wawancara dari ibu Empad Sulistina Wati:

“Pandangan saya terhadap wanita tentang politik gender sering kali berakar pada pengalaman pribadi dan pengamatan terhadap ketidaksetaraan yang terjadi dalam masyarakat. Bagi banyak wanita politik gender bukanlah sekedar wacana teoritis, melainkan realitas hidup yang memengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan bahkan keamanan pribadi. Mereka mungkin berpendapat bahwa politik gender harus secara aktif mengidentifikasi dan membongkar struktur patriarkis yang telah lama meminggirkan perempuan dari ruang pengambilan keputusan. Ini berarti tidak hanya memperjuangkan representasi yang lebih besar bagi perempuan di parlemen atau posisi kepemimpinan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan tantangan unik yang dihadapi perempuan, seperti isu kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, atau kurangnya dukungan untuk peran ganda perempuan dalam keluarga dan karier.”

Sedangkan menurut Rian Ramadhan sendiri dalam wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa:

“Partisipasi wanita dapat membawa perspektif yang berbeda, berpotensi mengubah dinamika kebijakan, dan mendorong isu-isu yang mungkin terabaikan oleh legislatif yang didominasi laki-laki, seperti kesehatan reproduksi, hak anak, atau isu kekerasan berbasis gender. Selain itu, keterlibatan wanita dalam politik dapat menginspirasi generasi muda dan mematahkan stereotip gender yang membatasi peran wanita hanya pada ranah domestik.”

Pesan kepada perempuan yang ingin dan sedang terlibat di dalam ranah politik

Dalam wawancara dengan Bapak Asoy, seorang warga masyarakat umum di Kecamatan Lembang, ditemukan pandangan yang lebih konservatif terhadap keterlibatan perempuan di dunia politik. Ia menyampaikan bahwa dirinya secara pribadi kurang setuju jika perempuan terlalu jauh terlibat dalam politik, terutama jika peran tersebut dianggap dapat mengganggu fungsi dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

“Kalau menurut saya, perempuan itu sebaiknya tidak terlalu dalam masuk ke dunia politik. Takutnya nanti lupa sama tugas utamanya di rumah atau jadi ikut-ikutan panasnya politik. Tapi kalau ikut, semoga tetap amanah, dan jangan sampai lupa sama masyarakat kecil. Itu yang paling penting,” tutur Bapak Asoy.

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya pengaruh budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat, di mana perempuan dianggap memiliki batas-batas tertentu dalam berkiprah di ruang publik, termasuk di ranah politik. Meski demikian, Bapak Asoy tetap memberikan pesan agar siapa pun perempuan yang terlibat dalam politik tetap menjaga amanah dan tidak melupakan masyarakat kecil.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa dukungan terhadap perempuan dalam politik belum sepenuhnya diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Masih terdapat pandangan yang membatasi perempuan berdasarkan peran domestik tradisional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan, yang tidak hanya membutuhkan dukungan struktural dari pemerintah, tetapi juga perubahan cara pandang dan budaya di tingkat masyarakat.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana budaya patriarki menjadi hambatan struktural dalam keterlibatan politik perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi budaya patriarki telah lama menjadi hambatan struktural yang membatasi keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Dalam sistem patriarki, laki-laki diposisikan sebagai pemegang kekuasaan utama, sedangkan perempuan sering kali dianggap kurang layak atau kurang mampu untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Namun, hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perubahan paradigma di masyarakat. Mayoritas informan, baik dari kalangan perempuan aktif dalam partai politik, anggota legislatif perempuan, maupun beberapa kalangan masyarakat, secara tegas menolak sistem patriarki dan mendukung penuh keterlibatan perempuan dalam politik. Mereka berpendapat bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, terutama dalam memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Namun beberapa pandangan masyarakat terhadap perempuan yang aktif di politik juga masih terjebak dalam pemikiran konservatif. Perempuan dianggap terlalu emosional, kurang tegas,

dan tidak layak untuk memegang posisi kepemimpinan. Stereotip ini semakin diperparah dengan sorotan media yang lebih menekankan aspek personal perempuan politisi dibandingkan dengan prestasi atau program kerja yang mereka miliki. Akibatnya, banyak perempuan yang merasa minder atau tidak percaya diri untuk terlibat lebih jauh dalam dunia politik. Padahal, seperti yang disampaikan oleh Ibu Empad dalam wawancara, perempuan memiliki kepekaan sosial yang tinggi, ketelatenan, dan kemampuan manajerial yang baik, yang sangat dibutuhkan dalam dunia politik. Ia juga menekankan bahwa perempuan bisa menjadi penyeimbang dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Stereotip adalah penilaian atau gambaran kaku tentang sifat, watak, dan perilaku suatu kelompok atau golongan berdasarkan prasangka yang tidak tepat dan subjektif. Hubungan antara stereotip dan gender adalah bahwa stereotip gender merupakan keyakinan atau penilaian yang menggeneralisasi perbedaan sifat, peran, dan kemampuan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan norma sosial dan budaya yang sudah lama melekat di masyarakat. Stereotip ini sering kali membatasi dan mendikotomi peran gender, misalnya laki-laki dianggap harus kuat, tidak emosional, dan menjadi pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dianggap lebih emosional, cocok mengurus rumah tangga, dan kurang mampu di bidang sains atau teknologi. Akibatnya, stereotip gender dapat menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan, yang sering dipandang kurang kompeten atau kurang layak untuk posisi tertentu hanya karena jenis kelaminnya. Stereotip ini juga mempengaruhi pola asuh, lingkungan kerja, dan interaksi sosial yang memperkuat ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan (Gina FahariFebriyanti & Mudiwati Rahmatunnisa, n.d.).

Stereotip gender yang berkembang di masyarakat juga menjadi salah satu faktor utama yang membatasi ruang gerak perempuan dalam politik. Stereotip ini membentuk persepsi bahwa perempuan hanya cocok untuk peran domestik, sementara politik dianggap sebagai ranah laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali merasa tidak percaya diri untuk terjun ke dunia politik dan bahkan menghadapi tekanan sosial jika memilih untuk aktif di ranah publik. Budaya patriarki yang masih kuat semakin memperkuat stereotip tersebut, menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan dan pengambil keputusan, sedangkan perempuan dianggap kurang layak atau tidak memiliki kapasitas untuk memimpin. Dalam struktur masyarakat seperti ini, perempuan kerap diberikan peran tradisional sebagai ibu rumah tangga atau istri, sehingga kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam politik menjadi sangat terbatas (Mhd. Latip Kahpi & Asriana Harahap, 2024).

Diskriminasi berbasis gender juga masih sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan verbal, intimidasi, maupun hambatan struktural di dalam partai politik. Perempuan yang ingin mencalonkan diri atau aktif dalam politik sering kali mengalami perlakuan tidak adil, mulai dari akses yang terbatas ke jaringan politik, kurangnya dukungan partai, hingga kekerasan berbasis gender yang dapat menurunkan keberanian mereka untuk berpartisipasi. Selain itu, beban ganda

sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga membuat perempuan kesulitan untuk membagi waktu dan energi, sehingga partisipasi politik mereka menjadi semakin rendah.

Selain itu, sistem patriarki juga tercermin dalam struktur pemerintahan di tingkat desa. Meskipun tidak ada larangan formal bagi perempuan untuk menduduki jabatan strategis, dalam praktiknya posisi-posisi penting seperti kepala seksi atau kepala bidang masih banyak didominasi oleh laki-laki. Perempuan lebih sering ditempatkan pada posisi administratif atau pendukung, seperti bendahara atau sekretaris. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kerja dalam pemerintahan masih belum sepenuhnya bebas dari bias gender. Ketimpangan ini menghambat perempuan untuk memiliki peran yang lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan politik. Informan dari pemerintahan desa menyebutkan bahwa meskipun perempuan punya kapasitas, tetapi masih kurang diberikan ruang yang setara.

Di sisi lain, muncul dukungan dari kalangan generasi muda yang menunjukkan adanya pergeseran perspektif. Seperti yang disampaikan oleh Santi, perempuan perlu diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri, termasuk dalam bidang politik. Ia mendukung perempuan untuk terlibat aktif dan menolak sistem patriarki yang mengekang kebebasan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan terhadap perubahan sosial ke arah yang lebih setara semakin terbuka, terutama melalui generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan gender.

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat tantangan terbesar yang dihadapi perempuan dalam dunia politik adalah stigma bahwa perempuan yang aktif dianggap melawan kodrat atau terlalu ambisius. Padahal, keterlibatan perempuan dalam politik justru dapat memperkaya perspektif kebijakan publik, menghadirkan isu-isu yang selama ini terabaikan seperti kesehatan perempuan, kekerasan berbasis gender, dan kesetaraan dalam pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Rian Ramadhan dalam wawancaranya bahwa partisipasi perempuan membawa perspektif baru dalam dinamika kebijakan, yang sangat penting bagi keberagaman dan keadilan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi stigma ini, perlu adanya upaya kolektif seperti pendidikan politik berbasis gender sejak dini, reformasi sistem kaderisasi partai yang lebih inklusif, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam menyuarakan pentingnya representasi perempuan.

Penting juga untuk menekankan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar soal pemenuhan kuota, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi yang bermakna dan substantif. Keberadaan perempuan dalam politik harus diiringi dengan peran aktif dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga negara sangat dibutuhkan untuk menghapus hambatan struktural dan kultural yang selama ini membatasi peran perempuan di ranah publik. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perubahan cara pandang masyarakat dan penguatan kapasitas perempuan adalah dua aspek utama dalam mendorong keterlibatan politik yang lebih adil dan setara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa patriarki memang menjadi hambatan struktural yang signifikan dalam keterlibatan politik perempuan. Hambatan ini bukan hanya berasal dari luar

diri perempuan, tetapi juga dari internalisasi nilai-nilai patriarki yang membuat perempuan merasa tidak layak untuk tampil di ruang publik. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya kesadaran kolektif, dukungan kebijakan afirmatif, dan pendidikan politik yang memberdayakan. Jika perempuan diberi ruang dan dukungan yang setara, maka mereka dapat berperan aktif dalam proses politik dan membawa perubahan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Politik gender secara komprehensif mengkaji bagaimana gender memengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan serta proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Salah satu akar masalah utama dalam politik gender adalah budaya patriarki, sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam kekuasaan politik, moral, kendali sosial, dan hak kepemilikan. Budaya ini melahirkan stereotip gender, yaitu keyakinan atau pandangan yang disederhanakan dan seringkali tidak akurat tentang karakteristik, peran, dan perilaku yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Stereotip ini kerap membatasi perempuan pada peran domestik dan menghambat mereka untuk berpartisipasi aktif dalam ruang publik, termasuk politik.

Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam politik terus mengalami peningkatan, baik dalam jumlah pemilih, aktivis, hingga menduduki posisi legislatif dan eksekutif. Peningkatan ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya tujuan politik gender, yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dan memastikan representasi yang adil bagi semua gender dalam setiap aspek kehidupan politik. Tujuannya adalah menciptakan kebijakan yang responsif gender dan masyarakat yang inklusif.

Namun, tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik masih sangat signifikan. Tantangan ini meliputi diskriminasi, kurangnya dukungan finansial dan struktural, kekerasan berbasis gender, dan resistensi dari budaya patriarki yang masih kuat. Di sisi lain, ada peluang besar bagi perempuan di ranah politik. Era digital dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan membuka jalan bagi mobilisasi, pembentukan jaringan, dan advokasi yang lebih efektif. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan juga menjadi kunci untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan demikian, politik gender bukan hanya tentang keterwakilan, tetapi juga tentang transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara.

Saran

Untuk mengatasi tantangan yang menghambat partisipasi perempuan di ranah politik dan mewujudkan kesetaraan gender, diperlukan serangkaian solusi komprehensif dan terkoordinasi.

1. Reformasi kebijakan dan legislasi mutlak diperlukan. Ini mencakup penerapan kuota gender yang efektif dalam daftar calon partai politik dan dalam penunjukan posisi-posisi kunci, serta

memastikan implementasinya diawasi dengan ketat. Selain itu, perlu ada peninjauan ulang terhadap undang-undang yang diskriminatif dan penghapusan hambatan hukum yang membatasi hak politik perempuan.

2. Penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan sangat krusial. Program pelatihan kepemimpinan yang terarah, lokakarya tentang strategi kampanye, dan pendidikan politik harus digalakkan untuk membekali perempuan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Ini juga termasuk dukungan untuk pengembangan jejaring dan mentorship bagi perempuan yang ingin terjun ke politik, memungkinkan mereka belajar dari pengalaman para pemimpin perempuan yang sudah lebih dulu berkiprah.
3. Perubahan budaya dan edukasi publik adalah fondasi jangka panjang. Kampanye kesadaran publik yang masif perlu dilakukan untuk membongkar stereotip gender yang merugikan dan mempromosikan citra perempuan sebagai pemimpin yang kompeten. Pendidikan sejak dini di sekolah harus menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender dan peran aktif perempuan dalam masyarakat. Penting juga untuk melibatkan media dalam menyebarkan narasi positif tentang kepemimpinan perempuan dan melawan narasi misoginis.
4. Dukungan finansial dan struktural perlu ditingkatkan. Partai politik harus memastikan adanya dukungan keuangan yang adil bagi kandidat perempuan, serta menyediakan infrastruktur yang mendukung kerja politik mereka. Ini bisa termasuk penyediaan penitipan anak atau fasilitas lain yang memungkinkan perempuan menyeimbangkan peran domestik dengan tuntutan politik. Terakhir, penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dalam politik harus diperkuat, menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua perempuan yang berani melangkah ke ranah publik. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini secara sinergis, kita dapat membuka jalan yang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran sentral dalam pembentukan masa depan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Nurcahyo. (2016). Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. *Jurnal Agastya*, 6(1).
- Ade Irma Sakina, & Dessy Hasanah Siti A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *SHARE: Social Work Journal*, 7(1).
- Angelita Epiphania Rnh, Marlan Hutahaean, & Artha Lumban Tobing. (2025). Perempuan dan Patriarki Politik: Pola Violence Against Women in Politics dan Dinamika Politik di DPR RI Periode 2014-2019 Hingga 2024-2029. *Journal of Laguna Geography*, 04(01).
- Eni Nur Wahyuni. (n.d.). Perempuan dan Politik (Study tentang keterlibatan perempuan di DPRD Kabupaten Lumajang). *Jurnal Indonesia*, 99(99).
- Fredik Lambertus Kollo. (2017). Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*.

- Fulthoni, Renata Arianingtyas, Siti Aminah, & Uli Parulian Sihombing. (2009). *Memahami Diskriminasi* (M. Yasin, Ed.). The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Gina FahariFebriyanti, & Mudiwati Rahmatunnisa. (n.d.). *Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip pada Sistem Patriarki*.
- Lexy.J. Meleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Luthfia Rahma Halizah, & Ergina Faralita. (2023). Budaya Patriarki dan Kesetaraan Gender. *WASAKA HUKUM: Jendela Informasi Dan Gagasan Hukum*, 11(1).
- Mhd. Latip Kahpi, & Asriana Harahap. (2024). Analisis Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Faktor Penghambat dan Pendorong. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 8(1).
- Moh. Khuza'i. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature dan Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1).
- Rani Ramadani, Dearnia Andanda Putri, Suci Sintya Harnum, & Rini Wahyuni Siregar. (2024). Pemahaman Terhadap Diskriminasi Agama dan Sosial di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).
- Rizki Priandi, & Kholis Roisah. (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1).
- Sri Marmoah. (2017). Profil Gender dan Pendidikan Kota Jambi. *Harkat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 11(1).
- Suci Indah Lestari, & Hertanto. (2024). Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu(Kada) 2024 Di Provinsi Lampung. *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 9(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Bapak/Ibu melihat keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik di tingkat kecamatan dan masyarakat selama ini?
2. Bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap perempuan yang aktif di ranah politik atau pemerintahan?
3. Menurut Bapak/Ibu, adakah stereotip atau pandangan budaya tertentu yang masih membatasi ruang gerak perempuan dalam politik?
4. Apakah bapak/ibu masih melihat adanya sistem patriarki dalam kestrukturannya atau pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki dalam pemerintahan?
5. Menurut anda, apakah perempuan cocok untuk masuk ke dalam ranah ruang politik? Mengapa?
6. Ketika rekan, murid, tetangga perempuan yang ingin masuk ke ruang politik, bentuk dukungan seperti apa yang bisa ibu/bapak berikan?
7. Apakah Bapak/Ibu mendukung perempuan dari keluarga Bapak/Ibu jika ingin terjun ke dunia politik? Mengapa?
8. Jika Bapak/Ibu menjadi pemimpin, apa yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk menghapus hambatan patriarki dalam politik?

9. Apakah Ibu/Bapak merasa bahwa perempuan muda saat ini lebih terlibat dalam politik dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
10. Apa pesan yang ingin Ibu/Bapak sampaikan kepada perempuan yang ingin terlibat di dalam ranah politik tetapi merasa terhambat oleh patriarki?

Lampiran II: Dokumentasi

